



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 41 TAHUN 2006

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut merupakan landasan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas ;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 dan mengaturnya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007 – 2008, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam 2 (dua) lampiran peraturan ini, yaitu Lampiran I berupa Naskah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007, dan Lampiran II berupa Indikasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2007.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan landasan kebijakan operasional bagi seluruh perangkat daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007.

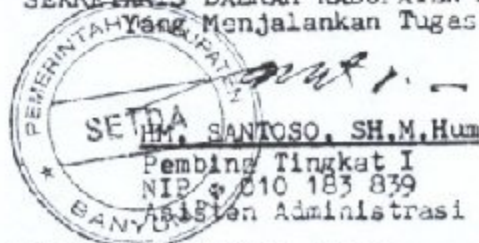
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 08 September 2006



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 8 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Yang Menjalankan Tugas



BERITA DAERAH KAB. BANYUMAS NOMOR 26 SERI E



**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 41 TAHUN 2006**

**NASKAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2007**

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

2006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2007 telah dapat disusun tanpa menemui kendala yang berarti. Merupakan kebahagiaan bagi kita semua bahwa dengan tersusunnya RKPD ini memberikan arti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas bersama dengan masyarakat telah siap menghadapi masa pembangunan tahun mendatang.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD disusun guna menentukan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2007 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008.

Dengan mendasarkan pada visi, misi dan agenda pembangunan jangka menengah kabupaten Banyumas, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas pada tahun 2007 diarahkan dalam rangka ***kemandirian daerah dengan menjadikan investasi daerah sebagai pilar utama yang didukung oleh pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien***. Untuk menuju arah pembangunan ***kemandirian daerah*** tersebut maka pembangunan pada tahun 2007 menitikberatkan pada pengembangan investasi melalui :

1. Pembangunan infrastruktur daerah, berupa peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan ketersediaan fasilitas umum;
2. Mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur desa dan kota melalui peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan meningkatkan bantuan stimulan pembangunan desa/kelurahan;

3. Meningkatkan daya tarik investasi melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan investasi daerah berupa deregulasi perizinan dalam rangka menjamin pelaksanaan *one stop service* dan pemberian insentif penanaman modal investor.

Bersamaan dengan hal tersebut perlu pula didukung peningkatan kinerja pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Peningkatan kinerja pelayanan dasar dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta pengembangan ketenagakerjaan;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui upaya pemberantasan buta aksara, penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terutama rehabilitasi SD/MI;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa pengembangan rumah sakit daerah dan sarana rawat inap di puskesmas;
4. Melestarikan budaya Banyumasan dengan kegiatan ekstrakurikuler pengembangan bahasa Banyumasan melalui muatan lokal dan kamus bahasa Banyumasan.

Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan melalui pengelolaan sistem perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

Kebijakan pokok tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan baik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD), penentuan alokasi pagu anggaran Indikatif SKPD dan program pembangunan.

Harapan kita bersama bahwa dengan tersusunnya RKPD ini akan semakin meningkatkan akuntabilitas pembangunan daerah yang pada akhirnya adalah tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008.



DAFTAR LAMPIRAN I
NASKAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1-1
A. Latar Belakang	1-1
1. Visi dan Misi Daerah	1-1
2. Gambaran Kondisi Umum Terkini di Daerah	1-2
3. Isu dan Masalah Mendesak	1-19
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD	1-19
1. Maksud Penyusunan RKPD	1-19
2. Tujuan Penyusunan RKPD	1-19
C. Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD	1-20
1. Proses Penyusunan RKPD	1-20
2. Sistematika Rancangan Awal RKPD	1-21
BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	2-1
A. Pertumbuhan Ekonomi	2-1
B. Struktur Ekonomi di Kabupaten Banyumas	2-1
C. Laju Inflasi	2-3
D. Pendapatan Per Kapita	2-4
BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN	3-1
BAB IV RENCANA KERJA	4-1
A. Agenda Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	4-1
1. Strategi dan Program Pembangunan dalam rangka Menurunkan Angka Kemiskinan	4-1
2. Strategi dan Program Pembangunan dalam rangka Menurunkan Angka Pengangguran	4-2

3. Strategi dan Program Pembangunan dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4-3
4. Strategi dan Program Pembangunan dalam rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	4-7
B. Agenda Pemantapan Kemandirian Daerah	4-9
1. Strategi dan Program Pembangunan dalam rangka Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	4-9
2. Strategi dan Program Pembangunan dalam rangka Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengembangan Investasi	4-14
C. Agenda Perwujudan Pemerintahan Demokratis	4-16
1. Strategi dan Program Pembangunan dalam rangka Meningkatkan Kualitas Penegakkan Hukum	4-16
2. Strategi dan Program Pembangunan dalam rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	4-18
BAB V RINGKASAN PENDANAAN	5-1
A. Proyeksi Pendapatan Daerah	5-1
B. Rencana Indikasi Anggaran	5-2
BAB VI PENUTUP	6-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Visi dan Misi Daerah

a. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 Visi Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Banyumas yang Sejahtera, Mandiri dan Demokratis"**.

Pengertian :

- Kabupaten Banyumas yang Sejahtera dalam arti terlayannya kebutuhan dasar dan rasa aman secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- Kabupaten Banyumas yang Mandiri dalam arti daerah mampu memberdayakan masyarakat dan sumber daya yang ada secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.
- Kabupaten Banyumas yang Demokratis dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia .

b. Misi

Dalam rangka upaya mencapai visi kabupaten Banyumas, telah dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pelayanan dasar dalam bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ketentraman dan ketertiban yang adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

Misi pertama dirumuskan untuk mengatasi isue pokok kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari isue kemiskinan, isue pengangguran, isue pendidikan, dan isue kesehatan.

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan berkelanjutan secara efisien dan efektif dengan mengembangkan sumber daya lokal yang didukung sarana prasarana dan sistem investasi yang baik;
Misi kedua dirumuskan untuk mengatasi issue pokok kemandirian daerah yang terdiri dari issue pemberdayaan masyarakat, dan issue investasi.
3. Memantapkan perwujudan pemerintahan yang demokratis dengan menjunjung tinggi hukum dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dengan mendasarkan pada nilai-nilai budaya lokal.
Misi ketiga dirumuskan dalam rangka mengatasi issue pokok pemerintahan demokratis yang terdiri dari issue penegakan hukum, dan issue pemerintahan demokratis.

2. Gambaran Kondisi Umum Terkini di Daerah.

a. Kondisi Wilayah

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak diantara 108° 39'17" – 109° 27'15" Bujur Timur dan 7° 15'05" – 7° 37'10" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.784 Ha atau 24,69%, sedangkan sisanya 99.975 Ha atau 75,31% merupakan lahan bukan sawah. Perubahan status lahan sawah menjadi non sawah dalam periode lima tahun terakhir (2000-2004) 147 hektar lahan sawah berubah fungsi terutama menjadi daerah permukiman. Hal ini terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, termasuk pendatang dari luar wilayah Kabupaten Banyumas.

Secara administratif Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 kecamatan yang terdiri dari 331 desa/kelurahan. Kecamatan Cilongok merupakan wilayah yang paling luas yaitu 105,34 Km², sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan wilayah yang paling sempit yaitu hanya 7,40 Km². Dalam lingkup regional, letak Kabupaten Banyumas memiliki posisi yang sangat strategis dalam konstelasi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah karena beberapa aspek, yaitu :

1. Kabupaten Banyumas berada pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yakni jalur Jawa Barat – Cilacap, Jawa Barat – DIY, Jawa Barat – Pegunungan Dieng dan sekitarnya;
2. Kabupaten Banyumas berada dalam rangkaian situs pariwisata lintas Provinsi, yakni kawasan Pancimas (Pangandaran, Cilacap dan Banyumas). Hal ini dapat membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata di Kabupaten Banyumas baik dari segi pengembangan obyek wisata, fasilitas pendukung pariwisata maupun aksesibilitas untuk mencapai obyek wisata;
3. Dalam struktur kewilayahan nasional, Kabupaten Banyumas menjadi salah satu pusat pengembangan kawasan penting di wilayah tengah dan berada di jalur transportasi nasional lintas selatan dengan jangkauan pelayanan meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Hal itu menambah peluang untuk meningkatnya potensi internal seperti fasilitas pendidikan (khususnya perguruan tinggi) dan pariwisata yang berskala nasional;
4. Dalam struktur pengembangan regional Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas diposisikan sebagai kawasan prioritas dengan arah pengembangan kawasan basis pertanian, kawasan perbatasan antar Provinsi, kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap bencana alam termasuk banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah bagian selatan;
5. Letak Kabupaten Banyumas yang berdekatan dengan Kabupaten Cilacap sebagai kawasan industri di Jawa Tengah bagian selatan, memberikan peluang untuk menjadi pendukung kegiatan industri baik dari segi penyediaan sumber material maupun bahan dasar industri.

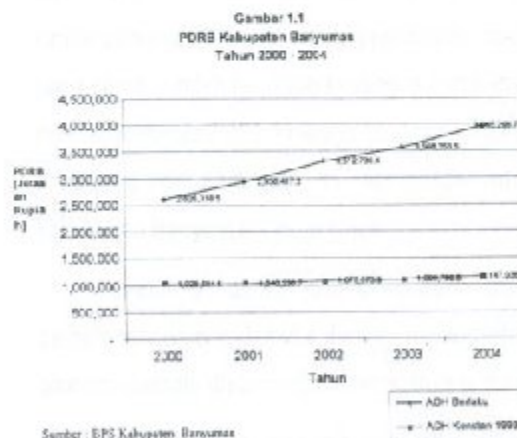
Kabupaten Banyumas juga merupakan pusat pengembangan kawasan di dalam kerangka pembangunan nasional dengan pusat pengembangan di Kota Purwokerto dan wilayah pelayanannya meliputi beberapa kota seperti Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Sokaraja, Ajibarang, Wangon dan Cilacap. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kota Purwokerto ditetapkan

sebagai kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Hal ini bertitik tolak dari fungsi Kota Purwokerto pada khususnya dan Kabupaten Banyumas pada umumnya sebagai daerah yang mempunyai peranan penting di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Selain itu keberadaan fasilitas pendidikan yang berskala nasional seperti perguruan tinggi negeri Universitas Jenderal Sudirman, kawasan wisata Baturraden dan saat ini sedang dikembangkan kawasan Kebun Raya di kaki Gunung Slamet menjadikan Kota Purwokerto semakin penting peranannya.

b. Kondisi Ekonomi Wilayah

Gambaran perekonomian suatu daerah bisa dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan kontribusi masing-masing sektor, struktur ekonomi, tingkat inflasi, investasi, pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan, dan pendapatan asli daerah.

1). Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektoral



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 hingga tahun 2004 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 2.626.318.550.000,00; meningkat menjadi Rp. 2.936.417.202.000,- pada

tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 menjadi Rp. 3.312.730.470.000,-. Pada tahun 2003 naik menjadi sebesar Rp. 3.568.353.558.000,- dan pada tahun 2004 menjadi Rp. 3.955.425.786.000,-.

Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 dari tahun 2000 hingga tahun 2004 juga mengalami peningkatan. PDRB atas dasar harga konstan

tahun 1993, pada tahun 2000 sebesar Rp.1.028.604.674.000,-. Pada tahun 2001 meningkat menjadi sebesar Rp.1.040.236.787.000,- kemudian pada tahun 2002 naik menjadi Rp.1.075.573.954.000,-. Pada tahun 2003 naik menjadi sebesar Rp.1.099.799.516.000,- dan pada tahun 2004 naik menjadi Rp.1.147.005.725.000,-. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir tersebut Kabupaten Banyumas terlihat pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah sebesar 4,03%, 1,13%, 3,40%, 2,25%, dan 4,25% atau mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 3,02% per tahun.

Bila kita lihat dari laju pertumbuhan setiap sektor ekonomi, maka pertumbuhan terbesar yaitu sektor keuangan sebesar 8,9%, sektor listrik sebesar 5,49%, sektor jasa sebesar 5,66%, dan sektor bangunan sebesar 5,37%.

Tumbuhnya sektor keuangan disebabkan oleh naiknya jumlah lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank. Selama 3 (tiga) tahun terakhir lembaga keuangan bank bertambah 22 bank dari 104 bank pada tahun 2002 menjadi 126 bank pada tahun 2005. Pertambahan bank tersebut meliputi 7 kantor cabang, 12 kantor cabang pembantu, dan 3 kantor kas. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah lembaga keuangan non bank naik dari 243 lembaga keuangan non bank menjadi 253 lembaga keuangan non bank atau bertambah 10 lembaga keuangan non bank. Hal ini merupakan indikator bahwa peredaran uang di Kabupaten Banyumas cukup tinggi.

Tumbuhnya sektor jasa disebabkan oleh meningkatnya sub sektor jasa pemerintahan yang ditandai dengan meningkatnya dana akibat dari pemberlakuan otonomi daerah, disamping meningkatnya sub sektor jasa swasta.

Adapun sektor yang lain pertumbuhannya dibawah 5% diantaranya sektor perdagangan 4,32%, sektor angkutan dan komunikasi 3,85%, sektor penggalian 3,60%, sektor industri 3,48%, dan sektor pertanian sebesar 2,37%.

Pertumbuhan sektor perdagangan disebabkan oleh bertambahnya jumlah perusahaan dagang yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebanyak

1.035 buah atau naik 4,5 kali dibanding pada tahun 2003. Pertumbuhan sektor bangunan diakibatkan oleh banyaknya pembangunan fisik yang sebagian besar merupakan pembangunan perumahan dan pasar modern. Sedangkan sektor penggalan relatif stagnan, hal ini sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang tidak cukup memiliki sumber daya alam yang memadai seperti kabupaten lain disekitarnya

c. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah

1). Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dari keadaan prasarana ekonomi yang ada seperti pasar (baik pasar tradisional maupun pasar modern), toko, dan lembaga keuangan bank maupun non bank. Rata-rata jumlah toko pada setiap kecamatan adalah 81 (pembulatan dari 81,27233) per 10.000 penduduk, dan pasar adalah 1 (pembulatan dari 0,86460) per 10.000 penduduk. Kecamatan dengan jumlah toko terbanyak adalah Kecamatan Cilongok, sedangkan jumlah toko paling sedikit ada di Kecamatan Sumbang. Kecamatan dengan jumlah pasar paling banyak adalah Kecamatan Kembaran sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Patikraja. Data tersebut mengindikasikan bahwa rasio jumlah prasarana ekonomi sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Banyumas.

Kegiatan perekonomian juga harus didukung oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Jumlah bank di Kabupaten Banyumas, pada tahun 2005 baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 126 buah, sedangkan lembaga keuangan non bank sebanyak 253 buah. Rasio bank per 10.000 penduduk di Kabupaten Banyumas adalah 0,82, yang berarti bahwa setiap 100.000 penduduk terdapat 8 bank (pembulatan dari 8,2). Sedangkan rasio lembaga keuangan bukan bank per 10.000 penduduk adalah 1,64, yang berarti bahwa setiap 100.000 penduduk terdapat 16 lembaga keuangan non bank. Rasio tertinggi untuk lembaga keuangan bank ada di Kecamatan Sokaraja dan lembaga keuangan non bank ada di Kecamatan

Purwokerto Timur, sedangkan rasio terendah untuk bank ada di Kecamatan Cilongok dan lembaga keuangan non bank ada di Kecamatan Tambak.

Tabel 2.1. Jumlah prasarana ekonomi per kecamatan tahun 2004

No	Kecamatan	Pasar	Kel. Pertokoan	Jumlah Penduduk	Rasio Pasar: Jml Pdk	Rasio Toko: Jml Pdk
1	Lumbir	3	249	45.625	0,65466	54,33715
2	Wangon	2	1.101	71.687	0,27899	153,58433
3	Jatilawang	5	365	56.385	0,88676	64,73353
4	Rawalo	2	355	46.873	0,42658	75,54991
5	Kebasen	5	176	54.393	0,91924	32,72480
6	Kemranjen	8	404	65.118	1,22854	62,04122
7	Sumpiuh	4	612	55.430	0,72153	110,40853
8	Tambak	4	517	47.455	0,84273	108,92236
9	Somagede	2	111	34.901	0,57305	31,80425
10	Kalibagor	8	377	42.431	1,86541	88,85013
11	Banyumas	7	549	47.626	1,46979	115,27317
12	Patikraja	1	522	47.547	0,21032	109,78611
13	Purwojati	3	168	33.952	0,68360	49,48152
14	Ajibarang	5	919	86.577	0,82403	106,14828
15	Gumelar	2	409	48.447	0,41282	84,42215
16	Pekuncen	8	487	64.731	1,23588	75,23443
17	Cilongok	6	721	110.784	0,54159	65,06160
18	Karanglewes	2	334	52.784	0,37690	63,27675
19	Kedungbenteng	2	34	50.903	0,39290	6,67937
20	Baturaden	4	402	42.815	0,93425	93,88233
21	Sumbang	4	30	69.315	0,57706	4,32807
22	Kembaran	18	461	64.614	2,78577	71,34677
23	Sokaraja	5	879	72.259	0,69196	121,54575
24	Purwokerto Selatan	6	169	63.994	0,93773	26,41265
25	Purwokerto Barat	5	523	60.776	0,93472	103,00142
26	Purwokerto Timur	8	1.075	64.058	1,24887	167,79047
27	Purwokerto Utara	1	550	46.595	0,21462	118,03642
		133	12.502	1.538.285	0,86460	81,27233

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

Tabel 2.2. Jumlah Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank per Kecamatan

No	Kecamatan	Lembaga Keu. Bank	Lembaga Keu. Non Bank
1	Lumbir	2	2
2	Wangon	6	4
3	Jatilawang	3	7
4	Rawalo	2	11
5	Kebasen	2	5
6	Kemranjen	2	4
7	Sumpiuh	5	6
8	Tambak	2	1
9	Scmagede	2	1
10	Kaliagor	4	4
11	Banyumas	7	11
12	Petikraja	4	4
13	Purwojati	2	2
14	Ajibarang	8	14
15	Gumelar	2	4
16	Pekuncen	2	6
17	Cilongok	4	10
18	Karanglewes	6	10
19	Kedungbenteng	4	7
20	Baturaden	3	9
21	Sumitang	4	6
22	Kembaran	4	11
23	Sokaraja	8	12
24	Purwokerto Selatan	8	18
25	Purwokerto Barat	9	10
26	Purwokerto Timur	12	59
27	Purwokerto Utara	9	15
Total		126	253

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

2). Sosial Budaya

a). Pendidikan

Rasio sekolah dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar ketersediaan setiap strata sekolah di setiap kecamatan. Jumlah sekolah menjadi salah satu tolok ukur evaluasi kesenjangan desa kota karena kebijakan pemberian izin pendirian sekolah sepenuhnya berada di Pemerintah Kabupaten. Sebaran jumlah sekolah (tanpa memperhatikan jumlah penduduk usia sekolah) menunjukkan bahwa rata-rata sekolah di wilayah kecamatan kota adalah 22 untuk TK, 36 untuk SD, 7 untuk SMP dan 10 untuk SMU.

Sedangkan wilayah desa rata-ratanya adalah 26 untuk TK, 43 untuk SD, 6 untuk SMP dan 3 untuk SMU. Melihat rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan fasilitas sekolah hanya pada tingkat SMU atau yang sederajat. Pada Tabel 2.3. disajikan sebaran sekolah per strata per kecamatan.

Tabel. 2.3. Jumlah Sekolah Berdasarkan Strata per Kecamatan Tahun 2004.

No.	Kecamatan	Strata				Jumlah
		TK	SD	SLTP	SMU	
1.	Lumbir	14	37	4	0	55
2.	Wangon	34	53	7	3	97
3.	Jatilawang	26	46	5	4	82
4.	Rawalo	38	39	8	5	90
5.	Kebasen	18	40	6	0	64
6.	Kemranjen	28	60	14	6	108
7.	Sumpiuh	20	45	7	8	80
8.	Tembak	20	41	8	2	71
9.	Somagede	14	30	4	1	49
10.	Kalibagor	19	33	4	2	58
11.	Banyumas	19	37	7	7	70
12.	Pekiraja	32	40	5	2	79
13.	Punwojati	20	23	5	0	48
14.	Ajibarang	38	54	9	5	106
15.	Gumelar	21	41	5	1	68
16.	Pekunden	29	51	8	2	90
17.	Glongok	54	71	7	1	133
18.	Karangewas	24	43	5	1	73
19.	Kedungbanteng	24	38	6	3	71
20.	Baturaden	16	33	4	1	54
21.	Sumbang	23	49	7	0	79
22.	Kembaran	38	45	5	1	90
23.	Sekaraja	31	50	6	6	93
24.	Punwokerto Selatan	22	34	9	11	76
25.	Punwokerto Barat	22	37	5	5	69
26.	Punwokerto Timur	27	45	12	21	105
27.	Punwokerto Utara	17	25	3	1	47
		688	1.142	175	93	2.105

Sumber : Diolah dari Banyumas Dalam Angka 2004

Keterangan:

- TK : TK & MD
- SD : SD & MI
- SLTP : SLTP & MTs
- SMU : SMU, SMK & MA

Kesenjangan jumlah sekolah antara desa dan kota dapat ditinjau dengan memperhatikan rasio jumlah penduduk per kelompok usia sekolah dengan jumlah sekolah yang ada. Formula yang digunakan untuk mengetahui rasio sekolah dan jumlah penduduk adalah seperti disajikan pada Tabel 2.4. Dengan menggunakan formula tersebut, secara umum sebenarnya rasio sekolah dan penduduk di wilayah desa dan wilayah kota tidak terlalu jauh rasionya kecuali rasio SMU dan penduduk usia SMU (Tabel 2.5).

Tabel 2.4. Formula perhitungan rasio sekolah per penduduk usia sekolah

Rasio yang dihitung	Formula
Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun.
Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun
Rasio penduduk usia Perguruan Tinggi per penduduk 19 tahun ke atas	Jumlah penduduk usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk usia 19 tahun ke atas.

Tabel 2.5. Rasio Sekolah dan Jumlah Penduduk pada Tahun 2004

Wilayah	Rasio			
	SD	SLTP	SMU	PT
Desa	0,00730	0,00199	0,00067	0,18635
Kota	0,00627	0,00217	0,00284	0,13753

b). Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang merupakan sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meliputi Pondok Bersalin Desa (Polindes), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, Balai Pengobatan (BP)/Klinik

Pengobatan, Rumah Bersalin (RB), Rumah Sakit Bersalin (RSB), Rumah Sakit, maupun Rumah Sakit Khusus (Rumah Sakit Bedah Orthopaedi).

Rasio fasilitas kesehatan menjadi salah satu tolok ukur evaluasi kesenjangan desa kota karena kebijakan pemberian ijin pendirian fasilitas kesehatan sepenuhnya berada di Pemerintah Kabupaten, sehingga seharusnya Pemerintah Kabupaten dapat mengatur pemerataan fasilitas kesehatan berdasarkan wilayah. Dengan meratanya fasilitas kesehatan paling tidak derajat kesehatan antara masyarakat desa dan kota tidak jauh berbeda.

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Fasilitas Kesehatan

Tahun	Strata					Jumlah
	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polik BP	
2002	10	7	39	39	53	148
2003	13	16	39	39	54	161
2004	17	17	39	39	59	170

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

Pada tabel dilihat dapat dilihat bahwa jumlah Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, dan Poliklinik/Balai Pengobatan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu jumlahnya tetap, hal ini dikarenakan jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah desa dilaksanakan juga melalui kegiatan Puskesmas Keliling, Polindes (Pondok Bersalin desa) atau Poliklinik Kesehatan Desa (PKD). Jumlah Polindes yang telah dikembangkan menjadi PKD di wilayah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2005 sebanyak 68 buah dari 209 Polindes yang ada dan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di luar eks Kotatip Purwokerto khususnya pada desa yang jauh jangkauannya dari fasilitas kesehatan yang telah ada. Sedangkan dalam rangka meningkatkan

pelayanan kesehatan rujukan di wilayah Kabupaten Banyumas bagian barat, maka dilakukan upaya pembangunan RSUD Ajibarang secara bertahap sejak tahun 2004.

Persebaran fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas pada setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Jumlah fasilitas kesehatan menurut jenis dan kecamatan tahun 2004

No.	Kecamatan	Jenis Fasilitas Kesehatan					Jumlah
		Rum ah Sakit	Rum ah Sakit Bersalin	Puskes- mas	Puskes- mas Pem- bantu	Poli/ BP	
1.	Lumbir			1	2	0	3
2.	Wangon		2	2	2	2	8
3.	Jatilawang			1	2	2	5
4.	Rawalo			1	1	0	2
5.	Kebasen			1	1	3	5
6.	Kemranjen			2	2	2	6
7.	Sumpiuh	1	1	2	2	2	8
8.	Tambak		1	2	1	2	6
9.	Scmagege			1	1	1	3
10.	Kalibagor			1	1	1	3
11.	Banyumas	3	1	1	2	1	8
12.	Patikraja	1		1	2	3	7
13.	Purwojati			1	2	0	3
14.	Ajibarang	2		2	2	2	8
15.	Gumelar			1	1	2	4
16.	Pekuncen			1	2	2	5
17.	Cilongok		2	2	2	2	8
18.	Karanglewas			1	1	2	4
19.	Kedungbanteng	1		1	1	3	6
20.	Baturaden			2	1	3	6
21.	Sumbang			2	2	1	5
22.	Kembaran		1	2	1	2	6
23.	Sekaraja	1		2	2	3	8
24.	Pwt.Selatan	2	3	1	1	5	14
25.	Pwt.Barat	2	2	1	1	3	9
26.	Pwt.Timur	3	1	2	1	7	14
27.	Pwt.Utara	1	3	2		3	8
Total		17	17	39	39	59	170

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Untuk dapat memenuhi pemerataan pelayanan kesehatan masih perlu memperhatikan pemerataan rasio fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.

Rasio Tenaga Kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel (2.8) berikut :

Tabel 2.8. Rasio Tenaga Kesehatan dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2004

No	Jenis tenaga	Jumlah	Ratio per 100.000 pddk	Target IIS 2010 per 100.000 pddk
1	Dokter Umum	172	11.2	40
2	Dokter Spesialis	80	5.2	6
3	Dokter Gigi	45	2.9	11
4	Apoteker	15	1.0	10
5	Bidan	377	24.5	100
6	Perawat	900	58.5	117.5
7	Ahli Gizi	55	3.6	22
8	Ahli Sanitasi	83	5.4	40
9	Ahli Kesehatan Masy.	20	1.3	40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Berdasarkan tabel (2.8) di atas dapat disimpulkan bahwa rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih kurang.

Guna pemerataan pelayanan kesehatan, maka rasio jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah penduduk perlu diperhatikan. Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa rasio jumlah fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk di wilayah desa adalah 0,94, sedangkan di wilayah kota adalah 1,71. Pada Tabel 2.9. disajikan rasio jumlah fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk pada wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Tabel. 2.9. Rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan per 10.000 penduduk

No.	Kecamatan	Rasio fasilitas kesehatan
1.	Lumbir	0,65
2.	Wangon	0,98
3.	Jatilawang	0,89
4.	Rawalo	0,64
5.	Kebasen	0,92
6.	Kemranjen	0,92
7.	Sumpiuh	1,44
8.	Tambak	1,26
9.	Somagede	0,86
10.	Kalibagor	0,71
11.	Banyumas	1,47
12.	Patikraja	1,47
13.	Purwojati	0,88
14.	Ajibarang	0,92
15.	Gumelar	0,83
16.	Pekuncen	0,77
17.	Cilongok	0,72
18.	Karanglewas	0,76
19.	Kedungbanteng	1,18
20.	Baturaden	1,17
21.	Sumbang	0,72
22.	Kembaran	0,93
23.	Sokaraja	1,11
24.	Purwokerto Selatan	1,88
25.	Purwokerto Barat	1,77
26.	Purwokerto Timur	2,19
27.	Purwokerto Utara	1,72

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

c). Transportasi dan Perhubungan

Letak Kabupaten Banyumas sebagai wilayah transit dalam perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur mengakibatkan arus transportasi cukup padat sehingga keadaan sarana jalan menjadi sangat penting. Selain itu kondisi sarana jalan juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa yang selanjutnya mempengaruhi roda perekonomian. Kondisi topografi Kabupaten Banyumas yang sebagian wilayahnya berupa perbukitan dengan kemiringan yang curam dan tingginya curah hujan, berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor pada saat musim hujan. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kerusakan sebagian ruas jalan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan status jalan, panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Banyumas mencapai 4.454,46 km yang terbagi atas jalan nasional 129,08 km, jalan Provinsi 83,01 km, jalan kabupaten 804,28 km dan jalan desa/kelurahan 3.438,09 km. Dari panjang jalan tersebut sebagian ruas jalan nasional dan jalan provinsi memerlukan upaya peningkatan baik pelebaran jalan maupun perbaikan. Sesuai dengan SK Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum No. 77/KPTS/ Db/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten, kondisi jalan berdasarkan pada kategorisasi baik, sedang, rusak dan rusak berat, adalah didasarkan pada kriteria tingkat kerusakan jalan beraspal yaitu pada besar kecilnya persentase luasan lubang-lubang, legokan/ambles, retak-retak dan alur bekas roda terhadap jumlah luas permukaan jalannya, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 2005 menunjukkan hampir 39,42% dari panjang jalan yang ada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Tabel 2.10. Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Banyumas Tahun 2005

No	Kondisi Jalan	Jumlah (Km)	Persentase (%)
1	Baik	273,48	34,00
2	Sedang	213,56	26,56
3	Rusak	171,07	21,27
4	Rusak Berat	146,15	18,17

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

Tabel 2.11. Kondisi Jembatan Kabupaten di Kabupaten Banyumas Tahun 2005

No	Kondisi	Jumlah (bh)	Parang (m)	Persentase (%)
1	Baik	156	1.173,04	39,89
2	Sedang	143	1.418,02	48,02
3	Rusak	47	331,50	11,24
4	Rusak Berat	2	25,00	0,85
TOTAL		348	2.952,86	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

d). Pengairan

Sarana pengairan atau irigasi merupakan sarana yang penting mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Banyumas. Arah kebijakan yang ditempuh di bidang irigasi adalah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengaturan air beserta sumber-sumbernya yang meliputi usaha penyediaan, pemberian dan pembagian air guna menunjang pengembangan pertanian, pemukiman, industri, pariwisata, penyediaan air bersih dan pengendalian banjir. Data sarana irigasi pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 14,57 persen sarana irigasi yang ada di Kabupaten Banyumas dalam kondisi rusak (Tabel 2.12).

Tabel 2.12. Kondisi Prasarana Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2005

No	Nama Daerah Irigasi (BPTP ⁴)	Luas D.I. (Ha)	Luas Daerah Tanam (Ha)	Kondisi	
				Baik (Ha)	Rusak (Ha)
1	Logawa (Pemerintah)	6.424,20	6.424,20	6.151,13	273,07
2	Tajum (Pemerintah)	3.572,00	3.572,00	3.572,00	0,00
3	Logawa (Pedesaan)	2.115,22	2.116,22	1.582,22	534,00
4	Kojawar Sumpuh (Pemerintah)	2.207,43	2.207,43	2.207,43	0,00
5	Pelus (Pedesaan)	8.753,15	8.753,15	7.265,28	1.487,89
6	Tajum (Pedesaan)	2.623,20	2.623,20	1.174,86	1.448,34
	Jumlah	25.596,20	25.696,20	21.952,9	3.743,3

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Banyumas

e). Telekomunikasi dan Energi

Jumlah pelanggan telepon di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2004 adalah sebanyak 24.559 pelanggan atau rasio rata-rata per kecamatan adalah sebesar 7,6 yang berarti setiap 100 rumah tangga terdapat 8 orang pelanggan. Jumlah pelanggan listrik sebanyak 205.508 pelanggan atau rasio rata-rata per kecamatan adalah 51,9 yang berarti bahwa setiap 100 rumah tangga terdapat 52 pelanggan listrik. Data pada Tabel (2.13.) menunjukkan bahwa, rasio jumlah pelanggan telepon di wilayah pedesaan masih sangat jauh dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Akan tetapi rasio pelanggan listrik di wilayah pedesaan maupun kota relatif sama.

Tabel 2.13. Persentase Pelanggan Telpon dan Pelanggan Listrik per Kecamatan Tahun 2004

No.	Kecamatan	Pel. Telpon	Pel. Listrik	Jml Rumah Tangga	% Pel. Telpon	% Pel. Listrik
1	Lumbir	17	4.818	14.049	0.12	34.29
2	Wangon	186	16.063	19.428	0.96	82.68
3	Jatilawang	212	6.693	16.109	1.32	42.79
4	Rawalo	41	7.622	12.719	0.32	59.93
5	Kebasen	10	2.254	14.012	0.07	16.09
6	Kemranjen	28	14.571	16.073	0.17	90.66
7	Sumpiuh	119	6.037	12.600	0.94	47.91
8	Tambak	43	8.877	10.805	0.40	80.31
9	Somagede	40	3.349	6.458	0.47	39.60
10	Kalibagor	163	6.031	11.308	1.44	53.33
11	Banyumas	369	5.272	12.192	3.03	43.24
12	Paikraja	584	9.530	13.116	4.45	72.65
13	Purwojati	50	625	8.783	0.57	7.12
14	Ajibarang	1.049	10.815	24.035	4.36	45.00
15	Gumelar	52	4.483	12.802	0.40	34.59
16	Pekuncen	300	7.451	14.411	2.06	51.70
17	Cilongok	1.121	10.392	26.307	4.26	39.50
18	Karanglewes	724	7.617	14.411	5.02	52.86
19	Kedungbanteng	352	7.683	12.855	2.74	59.84
20	Baturaden	1.400	9.794	10.970	12.78	89.26
21	Sumbang	42	9.668	18.909	0.22	51.13
22	Kembaran	312	7.587	16.299	1.91	46.55
23	Sokaraja	2.255	3.545	18.588	11.94	18.77
24	Purwokerto Selatan	5.493	10.940	16.066	36.48	72.61
25	Purwokerto Barat	3.895	11.016	11.991	32.48	91.87
26	Purwokerto Timur	4.240	12.046	13.415	31.61	89.80
27	Purwokerto Utara	1.462	739	16.073	9.10	4.60
Total		24.559	235.508	396.185	6.20%	61.87%

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

3. Isu dan Masalah Mendesak

Isue kemandirian daerah adalah bagian penting dalam proses pembangunan yang ingin dicapai pada akhir masa pembangunan jangka menengah tahun 2008. Kemandirian daerah yang berarti daerah mampu memberdayakan masyarakat dan sumber daya yang ada secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan menjadi isu sentral dalam pembangunan tahun 2007. Dengan demikian pembangunan yang direncanakan pada tahun 2007 harus mampu membangun *kemandirian daerah dengan menjadikan investasi daerah sebagai pilar utama yang didukung oleh pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.*

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

1. Maksud Penyusunan RKPD

Maksud penyusunan RKPD adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2007. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program SKPD, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2. Tujuan Penyusunan RKPD

Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2007 adalah untuk memberikan arahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2007 dan sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan pada tahun 2007.

- Menjabarkan RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008.
- Sebagai acuan bagi perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2007.
- Sebagai acuan dalam penetapan anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) tahun 2007
- Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tahun 2007.

C. Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD.

1. Proses Penyusunan RKPD

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Kabupaten. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas diawali dengan penyusunan Rancangan RKPD yang penyusunannya menjadi tugas dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu :

a. Tahap Penyusunan Rancangan RKPD

Rancangan RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan :

- (1) Visi dan Misi daerah
- (2) Isue-isue strategis daerah.
- (3) Prioritas pembangunan dalam kerangka isue strategis daerah.
- (4) Kebijakan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008.
- (5) Kapasitas Daerah yang meliputi Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Kapasitas Keuangan Daerah.
- (6) Perkembangan Aspirasi Masyarakat.

b. Tahap Penyerasian Rancangan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Tahunan Lainnya

Dokumen Rancangan RKPD dimatangkan dalam Lokakarya Penyusunan RKPD, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Disamping digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan lainnya baik dokumen perencanaan yang disusun pada tahap Musrenbang Desa, tahap Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD maupun Musrenbang Kabupaten, rancangan RKPD diserasikan dengan aspirasi yang berkembang dalam forum Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

BAB II

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

A. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Pendahuluan, pada sub A Latar Belakang angka 2 b (kondisi ekonomi wilayah) maka dapat diprediksi bahwa pada tahun 2007 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banyumas naik menjadi Rp. 1.272.074.396.013,-. Prediksi kenaikan angka PDRB atas dasar harga konstan ditentukan berdasarkan asumsi pertumbuhan linier. Hal tersebut masih belum dapat dijadikan sebagai target PDRB atas dasar harga konstan mengingat pertumbuhan PDRB juga ditentukan berbagai faktor ekonomi sosial lain yang terjadi. Dengan demikian masih perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2007.

B. Struktur Ekonomi di Kabupaten Banyumas

Struktur ekonomi Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir tahun 2000-2004 relatif tidak mengalami banyak perubahan. Perekonomian Kabupaten Banyumas masih didominasi oleh empat sektor yang memberikan kontribusi di atas 10 persen terhadap PDRB. Keempat sektor tersebut adalah sektor Pertanian, Industri, Jasa-jasa, dan sektor Perdagangan. Dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB tahun 2004, berdasarkan urutan besarnya sumbangan adalah sebagai berikut; sektor Pertanian menyumbang 24,28 persen, diikuti oleh sektor Industri dengan sumbangan 18,64 persen, sektor Jasa-jasa menyumbang 17,07 persen, dan sektor Perdagangan menyumbang 14,51 persen. Dua sektor yang sumbangannya antara 5 sampai 10 persen adalah sektor Pengangkutan yang menyumbang 9,36 persen, dan sektor Keuangan yang menyumbang 9,21 persen. Tiga sektor yang menyumbang di bawah lima persen masing-masing adalah sektor Bangunan yang menyumbang 3,88 persen, sektor Penggalan menyumbang 1,55 persen, dan sektor Listrik menyumbang 1,60 persen.

Gambar 2.1
Distribusi Persentase PDRB Kab. Banyumas menurut sektor
ADH Konstan tahun 1993



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

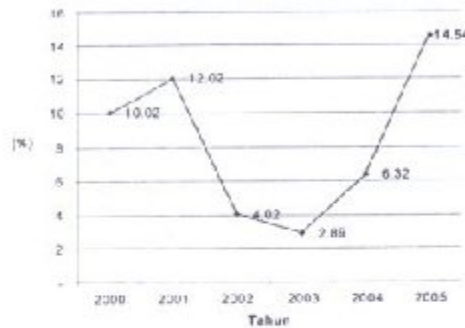
Dengan demikian sektor pertanian masih memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB, sedangkan sumbangan terkecil diberikan oleh sektor listrik. Namun demikian pertumbuhan sumbangan terbesar diberikan oleh sektor keuangan. Sebaliknya pertumbuhan sumbangan terkecil ditunjukkan oleh sektor pertanian yang justru mengalami penurunan.

Berdasarkan pertimbangan data series tahun 2000 – 2004 dan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan pada tahun 2007 diharapkan dapat mengurangi tingkat penurunan kontribusi sektor pertanian melalui upaya-upaya yang mengarah kepada pengembangan agroindustri dan agribisnis serta upaya mewujudkan agropolitan dengan didukung kebijakan pengembangan investasi. Namun demikian akan tetap dapat mempertahankan tingkat kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa melalui kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pengembangan investasi daerah berupa pembangunan infrastruktur dan deregulasi penjaminan investasi.

C. Laju Inflasi

Keadaan inflasi di Kabupaten Banyumas dari tahun 2000-2005 mengalami fluktuasi naik-turun. Tingkat inflasi di tahun 2005 sebesar 14,54% meningkat dari 6,32% pada tahun

Gambar 2.2
Laju Inflasi Kabupaten Banyumas
Tahun 2000 - 2005



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

2004. Tingginya angka inflasi tersebut di atas antara lain dipicu oleh naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) pada kelompok makanan, minuman, rokok dan tembakau. Sementara itu sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami peningkatan. Peningkatan indeks harga pada kelompok ini terutama disebabkan oleh naiknya indeks harga sub kelompok transportasi. Hal ini tidak lepas dari akibat kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)

lebih dari 100 persen pada tanggal 1 Oktober tahun 2005 yang lalu.

Gambaran kontradiktif ditunjukkan oleh sektor komunikasi dan jasa pengiriman yang mengalami penurunan tarif atau deflasi sebesar 0,38 persen. Ini disebabkan oleh adanya perang tarif antar penyelenggara komunikasi terutama *provider* seluler yang berkembang dengan pesat.

Inflasi pada tahun 2007 diharapkan dapat dikendalikan melalui pengembangan sektor riil. Pengembangan sektor riil tersebut dilaksanakan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat dibidang peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat berupa program-program pengembangan ekonomi masyarakat dan program-program pendukung lainnya. Dengan demikian pengendalian inflasi di tahun 2007 akan dapat memberi kontribusi yang mengarah pada situasi inflasi rendah, produksi meningkat, pertumbuhan ekonomi membaik, penurunan angka pengangguran.

D. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita masyarakat Banyumas selama tiga tahun terakhir atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan kurang signifikan dari Rp. 2.202.735,- pada tahun 2002 menjadi Rp. 2.583.490,- pada tahun 2004. Walaupun mengalami kenaikan, namun demikian

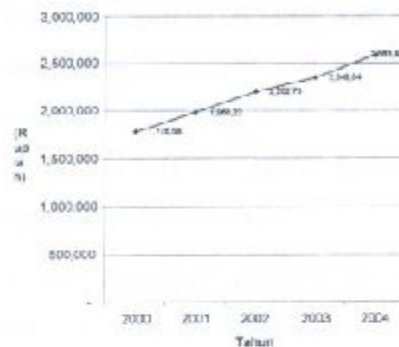
masih jauh lebih rendah dibandingkan PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 5.970.679,- pada tahun 2004. Sementara itu atas dasar harga konstan tahun 1993 menunjukkan angka sebagai berikut; pada tahun 2002 sebesar Rp. 715.182,- tahun 2003 Rp. 724.182,- dan tahun 2004 sebesar Rp. 749.168,- atau naik rata-rata 2,42%.

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari

Indeks Gini Rasio. Indeks Gini Rasio tahun 2005 Kabupaten Banyumas sebesar 0,43217 yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Banyumas dalam kondisi ketimpangan yang sedang, artinya bahwa pendapatan terdistribusi kurang merata tetapi juga tidak terlalu timpang. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1999 (Indeks Gini Rasio = 0,370919) ini menunjukkan adanya penurunan pemerataan pendapatan. Dapat pula ditambahkan bahwa sampai dengan tahun 2005 sebanyak 40 persen penduduk berpendapatan sedang di Kabupaten Banyumas menerima 50,85 persen dari total PDRB, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi menerima 26,26 persen dari total PDRB. Dengan demikian 40 persen penduduk berpendapatan rendah hanya menerima 22,89 persen dari total PDRB.

Pada tahun 2007 diharapkan terjadi peningkatan PDRB perkapita semakin mendekati nilai PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian kenaikan PDRB yang diharapkan tetap didukung dengan data indeks gini rasio yang semakin rendah.

Gambar 2.3
Pendapatan Perkapita ADH Berlaku
Kabupaten Banyumas Tahun 2002 - 2004



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan berdasarkan pada visi, misi dan agenda pembangunan jangka menengah kabupaten Banyumas, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas pada tahun 2007 diarahkan dalam rangka *kemandirian daerah dengan menjadikan investasi daerah sebagai pilar utama yang didukung oleh pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien*. Untuk menuju arah pembangunan *kemandirian daerah* tersebut maka pembangunan pada tahun 2007 menitikberatkan pada pengembangan investasi melalui :

1. Pembangunan infrastruktur daerah berupa peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan ketersediaan fasilitas umum;
2. Mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur desa dan kota melalui peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan meningkatkan bantuan stimulan pembangunan desa/kelurahan;
3. Meningkatkan daya tarik investasi melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan investasi daerah berupa deregulasi perizinan dalam rangka menjamin pelaksanaan *one stop service* dan pemberian insentif penanaman modal investor.

Bersamaan dengan hal tersebut perlu pula didukung peningkatan kinerja pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Peningkatan kinerja pelayanan dasar dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta pengembangan kelenagakerjaan;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui upaya pemberantasan buta aksara, penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terutama rehabilitasi SD/MI;

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa pengembangan rumah sakit daerah dan sarana rawat inap di puskesmas;
4. Melestarian budaya Banyumasan dengan kegiatan ekstrakurikuler pengembangan bahasa Banyumasan melalui muatan lokal dan kamus bahasa Banyumasan.

Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan melalui pengelolaan sistem perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut diatas program-program prioritas yang akan menentukan langkah utama pembangunan pada tahun 2007.

1). Program prioritas agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah :

Dalam rangka agenda pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat disusun 12 strategi pembangunan yang dijabarkan kedalam 29 program pembangunan, dan pada tahun 2007 ditetapkan 9 program prioritas pembangunan mendesak sebagai berikut :

- a. Program pembinaan masyarakat miskin;
- b. Program perlindungan masyarakat miskin;
- c. Program penciptaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- d. Program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan formal;
- e. Program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal;
- f. Program pemberantasan buta aksara;
- g. Program penuntasan Wajardikdas;
- h. Program pelestarian dan pengembangan budaya banyumasan;
- i. Program upaya kesehatan masyarakat;
- j. Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

2). Program prioritas agenda pemantapan kemandirian daerah adalah :

Dalam rangka agenda pembangunan pemantapan kemandirian daerah disusun 5 strategi pembangunan yang dijabarkan kedalam 30 program pembangunan dalam rangka

pelaksanaan, dan pada tahun 2007 ditetapkan 6 program prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan mendesak sebagai berikut :

- a. Program bantuan stimulan pembangunan desa/kelurahan;
- b. Program pembangunan infrastruktur desa/kelurahan;
- c. Program peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan investasi;
- d. Program penyediaan fasilitas umum;
- e. Program peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
- f. Program pengembangan ekonomi regional strategis.

3). Program prioritas agenda perwujudan pemerintahan demokratis adalah :

Agenda pembangunan perwujudan pemerintahan demokratis disusun 13 program pembangunan dalam rangka pelaksanaan 3 strategi pembangunan, dan pada tahun 2007 ditetapkan 5 program prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat sebagai berikut :

- a. Program peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. Program peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Program efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah;
- e. Program penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

BAB IV RENCANA KERJA

A. Agenda Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

1. Strategi dan program pembangunan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan

a. Strategi pembangunan

Upaya penurunan angka kemiskinan pada tahun-tahun terdahulu cukup berhasil (44,05% pada tahun 1999 menjadi 21,48% pada tahun 2004), akan tetapi pada tahun 2005 angka kemiskinan menjadi melonjak lagi (58,96%) dikarenakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Oktober 2005. Angka sementara kemiskinan tahun 2006 berdasarkan data koreksi alokasi Bantuan Langsung Tunai sebesar 44,2 %. Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan untuk mengupayakan penurunan angka kemiskinan sebesar $\pm 2\%$ (dua persen). Strategi-strategi yang diambil untuk mewujudkan target penurunan angka kemiskinan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam persaingan ekonomi

Saat ini kemampuan masyarakat dalam persaingan ekonomi masih kurang, terutama masyarakat di pedesaan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan masyarakat dalam persaingan ekonomi dengan mengembangkan ketrampilan dan motivasi dalam persaingan ekonomi dan membentuk lingkungan ekonomi yang sehat.

2) Meningkatkan sinergisme antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan lembaga swasta dalam pengentasan kemiskinan.

Saat ini penanganan pengentasan kemiskinan yang melibatkan perguruan tinggi, LSM dan lembaga swasta oleh pemerintah daerah masih kurang efektif. Sedangkan untuk menuntaskan pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang intensif agar terdapat sinergisme antara pemerintah dengan perguruan tinggi, LSM dan lembaga swasta.

3) Meningkatkan perlindungan sosial.

Pelayanan pemerintah dalam perlindungan sosial kepada masyarakat terutama masyarakat miskin masih sangat terbatas. Pelayanan yang ada baru menyentuh masyarakat pada saat terkena bencana saja. Sementara itu dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat miskin juga membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan dasar mereka.

b. Program pembangunan

1) Program pembinaan masyarakat miskin

Program pembinaan masyarakat miskin ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat miskin dan meningkatkan akses konsultasi masyarakat miskin dalam mengembangkan ekonomi.

2) Program bantuan pengembangan ekonomi masyarakat miskin

Program bantuan pengembangan ekonomi masyarakat miskin ditujukan untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat miskin dan meningkatkan kapasitas manajemen usaha masyarakat miskin.

3) Program peningkatan sinergisme pengentasan kemiskinan

Program peningkatan sinergisme pengentasan kemiskinan ditujukan untuk menyediakan lembaga konsultasi bagi masyarakat miskin dan meningkatkan sinergisme kegiatan organisasi lokal dalam program pengentasan kemiskinan.

4) Program perlindungan masyarakat miskin

Program perlindungan masyarakat miskin ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga miskin, memenuhi pelayanan dasar pendidikan bagi penduduk miskin, memenuhi pelayanan dasar kesehatan bagi penduduk miskin, memenuhi kebutuhan papan bagi keluarga miskin, dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat miskin dari ancaman dampak bencana alam.

2. Strategi dan program pembangunan dalam rangka menurunkan angka pengangguran

a. Strategi pembangunan

Angka pengangguran di Kabupaten Banyumas pada tahun 2005 adalah sebesar 4,86%. Berdasarkan kecenderungan penurunan angka pengangguran sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan untuk mengupayakan penurunan angka pengangguran sebesar $\pm 0,15\%$. Strategi-strategi yang diambil untuk mewujudkan target tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kesempatan kerja

Banyaknya tenaga kerja yang belum tertampung dalam lapangan pekerjaan menjadikan angka pengangguran masih tinggi, hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan kerja. Untuk itu diperlukan perluasan kesempatan kerja untuk menampung tenaga kerja yang ada.

2) Meningkatkan kemampuan tenaga kerja

Keterbatasan kemampuan/kapasitas tenaga kerja menjadikan berkurangnya kemampuan tenaga kerja untuk berkompetisi dalam memperoleh kesempatan kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang bekerja tidak optimal (setengah penganggur). Sehingga diperlukan pengembangan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja.

b. Program pembangunan

1) Program penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja

Program penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja ditujukan untuk menyediakan akses informasi kesempatan kerja dan meningkatkan kemampuan usaha masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja baru.

2) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon tenaga kerja dan memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan.

3. Strategi dan program pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga.

a. Strategi pembangunan

Kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2005 relatif cukup baik, terutama dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan sederajat sebesar 104,09%, Angka Partisipasi Murni Usia (APMus) SD dan sederajat sebesar 99,24%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan sederajat sebesar 85,43%, dan Angka Partisipasi Murni Usia (APMus) SMP dan sederajat sebesar 89,62%

Akan tetapi pendidikan pada usia diluar usia sekolah masih diperlukan penanganan tersendiri, hal tersebut tercermin dari masih tingginya angka buta huruf (108.204 orang), dimana sebanyak 21.807 orang adalah penduduk usia 10 s/d 44 tahun.

Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan untuk mengupayakan peningkatan indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan sederajat sebesar 106,37%, Angka Partisipasi Murni Usia (APMus) SD dan sederajat sebesar 99,5%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan sederajat sebesar 93,88%, dan Angka Partisipasi Murni Usia (APMus) SMP dan sederajat sebesar 91,65%. Sedangkan angka buta huruf usia 10 tahun s/d 44 tahun sebanyak 10.900 orang dapat dituntaskan pada tahun 2007. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan target tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan
Penyelenggaraan pelayanan pendidikan oleh pemerintah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan belum meratanya kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan yang ada. Oleh karena itu masih diperlukan adanya pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sistem pendidikan.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan pemuda, olahraga dan seni budaya
Perhatian pemerintah daerah dalam menangani masalah pemuda, olahraga dan seni budaya masih kurang. Hal itu menyebabkan kualitas pendidikan pemuda, olahraga dan seni budaya belum mencapai tingkat yang diharapkan. Sehingga diperlukan peningkatan kualitas pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya daerah.
- 3) Meningkatkan Relevansi Pendidikan;
Pelayanan dalam bidang pendidikan belum secara optimal dalam mencetak tenaga kerja siap pakai, hal itu disebabkan rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan tuntutan pembangunan. Sehingga perlu peningkatan upaya pendidikan dalam mencetak lulusan menjadi tenaga kerja yang siap pakai.

b. Program pembangunan

1) Program pelayanan bantuan terhadap pendidikan

Program pelayanan bantuan terhadap pendidikan ditujukan untuk meningkatkan mutu pembinaan kesiswaan pada setiap jenjang pendidikan formal.

2) Program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan formal

Program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan formal ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan formal

3) Program penuntasan Wajardikdas

Program penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar ditujukan untuk mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar kepada anak didik dari semua lapisan masyarakat.

4) Program peningkatan kualitas pendidikan non formal

Program peningkatan kualitas pendidikan non formal ditujukan untuk menurunkan jumlah masyarakat buta dengan meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan kelompok belajar (Kejar) paket A dan B, dan menyediakan pelayanan pendidikan informal untuk masyarakat yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan formal.

5) Program pemberantasan buta aksara

Program pemberantasan buta aksara ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Banyumas yang bebas buta aksara dengan memberikan pengetahuan/pendidikan aksara kepada seluruh lapisan masyarakat.

6) Program pelestarian dan pengembangan budaya banyumasan

Program pelestarian dan pengembangan budaya banyumasan ditujukan untuk mengembangkan bahasa banyumasan dalam muatan lokal yang didukung dengan adanya kamus bahasa banyumasan, menyediakan wadah bagi pembinaan dan pengembangan budaya banyumasan dan mengembangkan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan budaya.

7) Program pembinaan pemuda, olahraga dan seni

Program pembinaan pemuda, olahraga dan seni ditujukan untuk meningkatkan semangat partisipasi generasi muda dalam pembangunan, meningkatkan kualitas atlet olahraga daerah, dan meningkatkan kinerja kelembagaan/organisasi olahraga daerah.

8) Program perlindungan anak

Program perlindungan anak ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak dan perlindungan dari kekerasan terhadap anak dan menjamin persiapan anak dalam mengikuti proses pendidikan di masa mendatang.

9) Program pengembangan alat dan materi ajar pada pendidikan formal

Program pengembangan alat dan materi ajar pada pendidikan formal ditujukan untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan formal, menyatukan kurikulum muatan lokal dalam kurikulum pendidikan formal, meningkatkan perolehan rata-rata nilai hasil ujian akhir siswa didik, dan meningkatkan ketrampilan lulusan siswa sekolah kejuruan.

10) Program pengembangan kapasitas lembaga pendidikan formal

Program pengembangan kapasitas lembaga pendidikan formal ditujukan untuk mewujudkan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal

11) Program peningkatan kapasitas tenaga pendidik pada lembaga pendidikan formal

Program peningkatan kapasitas tenaga pendidik pada lembaga pendidikan formal ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan guru dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru.

12) Program peningkatan kegiatan ekstrakurikuler

Program peningkatan kegiatan ekstrakurikuler ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler.

4. Strategi dan program pembangunan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

a. Strategi pembangunan

Derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Banyumas pada saat ini sudah baik hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator kesehatan yang sudah memenuhi Indikator Indonesia Sehat 2010 (berdasarkan data pada tahun 2004, Usia Harapan Hidup (Eo) Kabupaten Banyumas = 74,43 tahun; IIS 2010 = 87,9 tahun, Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) Kabupaten Banyumas = 80,16/100.000KH; IIS 2010 = 150/100.000KH, Angka Kematian Bayi (IMR) Kabupaten Banyumas = 9,81/1.000KH; IIS 2010 = 40/1.000KH, Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Banyumas = 1,13%; IIS 2010 = 15%). Pada tahun 2007, kinerja pelayanan kesehatan diupayakan untuk dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dengan cara menekan Angka Kematian Ibu untuk berada dibawah 100 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi 22 per 1.000 KH, dengan penanganan kasus gizi buruk dan angka kesakitan 100%.

Strategi yang ditempuh dalam mencapai indikator derajat kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan saat ini belum optimal oleh karena itu perlu memfokuskan kegiatan- kegiatan yang mengarah pada pencapaian SPM.

2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Peningkatan sarana dan prasarana diarahkan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, melalui Puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan di desa sehingga meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan.

3) Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan.

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan (profesionalisme tenaga kesehatan) melalui pengadaan, pendidikan dan pelatihan.

4) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan serta jejaring pembangunan Kesehatan.

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan secara optimal serta mengembangkan jejaring pembangunan kesehatan secara holistik.

b. Program pembangunan

1) Program upaya kesehatan masyarakat

Program upaya kesehatan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan pelayanan upaya kesehatan masyarakat.

2) Program upaya kesehatan perorangan

Program upaya kesehatan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan pelayanan upaya kesehatan perorangan.

3) Program obat, makanan, dan perbekalan kesehatan

Program obat, makanan, dan perbekalan kesehatan ditujukan untuk menjamin ketersediaan obat, makanan dan perbekalan kesehatan, serta mengurangi penyalahgunaan obat-obat berbahaya.

4) Program pencegahan dan pemberantasan penyakit

Program pencegahan dan pemberantasan penyakit ditujukan untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan pemberantasan penyakit.

5) Program peningkatan sumberdaya kesehatan

Program peningkatan sumberdaya kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pendidikan sumberdaya kesehatan dan meratakan jumlah sumberdaya kesehatan.

6) Program penelitian dan pengembangan kesehatan

Program penelitian dan pengembangan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan informasi/database statistik untuk pengembangan kesehatan.

7) Program perbaikan gizi masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

8) Program lingkungan sehat

Program penyehatan lingkungan ditujukan untuk meningkatkan kinerja mutu lingkungan hidup yang sehat

9) Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dengan membangun kebijakan-kebijakan yang mampu mengatur operasionalisasi lembaga-lebaga kesehatan agar mampu memberi dukungan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

10) Program pengembangan sarana dan prasarana kesehatan

Program penyediaan sarana dan prasarana kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia maupun penambahan.

B. Agenda Pemantapan Kemandirian Daerah.

1. Strategi dan program pembangunan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat

a. Strategi pembangunan

Tingkat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Banyumas pada saat ini sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut tercermin dari makin tingginya tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan. Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan untuk mengupayakan peningkatan jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan menjadi sebesar ±

30 % (tiga puluh persen) dari jumlah bantuan stimulan yang diberikan pemerintah Kabupaten Banyumas. Selain itu Pemerintah Kabupaten Banyumas juga mentargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,55% pada tahun 2007.

Implementasi peraluran perundangan yang mengatur sistem perencanaan di daerah akan dapat diterapkan secara bertahap hingga pada tahun 2008. Kehadiran/partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan 80% akan menjadi target penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2007.

1) Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan bukan merupakan kewajiban pemerintah semata, melainkan diperlukan pula partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pendidikan.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Akan tetapi diperlukan juga peran serta masyarakat dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan.

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial politik dan ekonomi

Pembangunan di bidang sosial politik dan ekonomi bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, melainkan sangat dibutuhkan pula kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan membangun lingkungan sosial politik yang kondusif.

b. Program pembangunan

1) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan akses masyarakat dalam partisipasi pembangunan pendidikan.

- 2) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
- 3) Program pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat
Program pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola lembaga ekonomi masyarakat dan dalam upaya meningkatkan tingkat kesehatan lembaga ekonomi masyarakat.
- 4) Program peningkatan kemampuan usaha dan kualitas manajemen usaha
Program peningkatan kemampuan usaha dan kualitas manajemen usaha ditujukan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat, meningkatkan kemampuan modal kelompok usaha kecil dan menengah, menyediakan dan mewujudkan transfer teknologi tepat guna bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kualitas kemitraan usaha ekonomi masyarakat.
- 5) Program ketahanan pangan, agribisnis dan peningkatan pendapatan petani.
Program ini ditujukan untuk mencapai ketersediaan pangan yang cukup dan beragam pada tingkat nasional, regional dan rumah tangga, memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan petani, pengembangan kelembagaan serta peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
- 6) Program pengembangan agropolitan.
Program pengembangan agropolitan ditujukan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan pertanian dalam suatu model pembangunan yang memadukan antar sektor di wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani melalui pengembangan kawasan pertanian berbasis pengembangan usaha agrobisnis yang ditangani secara menyeluruh dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemasaran produk.

7) Program konservasi sumberdaya alam

Program ini ditujukan untuk menghijaukan lahan kritis, hutan rakyat, memperluas hutan lindung, hutan kota, menyelamatkan mata air, meningkatkan flora dan fauna, peningkatan pemakaian lahan kosong tepi sungai serta meningkatkan pemanfaatan sepadan jalan untuk tanaman baik sebagai pengayom maupun keindahan. Disamping itu program ini ditujukan meningkatkan kinerja pembangunan Kebun Raya Baturaden.

8) Program bantuan stimulan pembangunan desa/kelurahan

Program bantuan stimulan pembangunan desa/kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa/kelurahan dalam pembangunan desa/kelurahan dengan bantuan stimulan pembangunan dari pemerintah kabupaten.

9) Program pembangunan infrastruktur desa/kelurahan

Program bantuan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan infrastruktur desa/kelurahan dengan kota melalui bantuan pembangunan infrastruktur.

10) Program pengembangan air minum nasional berbasis masyarakat (Pamsimas)

Program pengembangan air minum nasional berbasis masyarakat (Pamsimas) ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan air minum bagi masyarakat, khususnya di pedesaan. Ketersediaan air minum ini diharapkan pula akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

11) Program peningkatan SDM pembangunan ekonomi masyarakat

Program peningkatan SDM pembangunan ekonomi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pengembangan kapasitas ekonomi dan membentuk kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat.

12) Program pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat

Program pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat ditujukan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas perekonomian masyarakat, mengembangkan komoditas pertanian, menyediakan fasilitas pemasaran hasil produksi perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kondisi lingkungan usaha ekonomi masyarakat.

13) Program pengembangan jaringan listrik pedesaan

Program pengembangan jaringan listrik pedesaan ditujukan untuk meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan penerangan di wilayah-wilayah desa yang belum terjangkau.

14) Program pengembangan tenaga listrik dan pengembangan sumberdaya energi

Program pengembangan tenaga listrik dan pengembangan sumberdaya energi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penyediaan listrik dan penerangan umum bagi masyarakat.

15) Program pengembangan pertambangan usaha rakyat terpadu

Program pengembangan pertambangan usaha rakyat terpadu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat dalam sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

16) Program pengembangan geologi dan sumberdaya mineral

Program pengembangan geologi dan sumberdaya mineral ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan informasi pengembangan geologi dan sumberdaya mineral.

17) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan dan fungsi jaringan irigasi bagi peningkatan kemampuan produksi lahan pertanian.

18) Program pengelolaan sungai dan sumberdaya air lainnya

Program pengelolaan sungai dan sumberdaya air lainnya ditujukan untuk mempertahankan fungsi sungai dan pengendalian kerusakan sungai dan pengembangan sumberdaya air sebagai penyedia sumberdaya air baku.

19) Program pembinaan kualitas kehidupan beragama

Program pembinaan kualitas kehidupan beragama ditujukan untuk meningkatkan jangkauan pembinaan keagamaan dan meratanya bantuan sarana dan peribadatan.

20) Program pengembangan sistem perlindungan masyarakat

Program pengembangan sistem perlindungan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan peran perlindungan masyarakat dan satuan pelaksana penanggulangan bencana alam sebagai inti dari sistem perlindungan

masyarakat, dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat.

21) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial.

22) Program pengembangan ekonomi regional strategis

Program pengembangan ekonomi regional strategis ditujukan untuk meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam rangka penguatan potensi ekonomi wilayah yang terpadu.

23) Program pengarusutamaan gender

Program pengarusutamaan gender gender ditujukan untuk meningkatkan peranserta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Strategi dan program pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur pengembangan investasi.

a. Strategi pembangunan

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Banyumas pada saat ini cukup memadai. Hal tersebut dapat terlihat dari makin meratanya sarana-prasarana di hampir seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Akan tetapi dalam mendukung dan menciptakan daya tarik investasi diperlukan peningkatan ketersediaan infrastruktur terutama sarana transportasi darat. Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan untuk mengupayakan peningkatan/rehabilitasi jalan kabupaten menjadi kualitas baik dan sedang sebesar $\pm 70,19\%$ (tujuh puluh koma satu sembilan persen) atau setara dengan $\pm 564,88$ km.

Selain itu, meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung, tingkat investasi sendiri mendapatkan perhatian tersendiri oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan melakukan pelayanan seluruh perizinan yang masuk (100 %).

1) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi

Pengembangan investasi di berbagai bidang sangat mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dengan melakukan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan perizinan investasi baru, jaminan keamanan serta perlindungan hukum.

2) Menciptakan daya tarik investasi

Penanaman investasi di berbagai bidang sangat berpengaruh terhadap laju pembangunan pada suatu daerah. Untuk itu diperlukan penyediaan tata ruang, pengembangan fasilitas umum dan infrastruktur sarana prasarana agar dapat menciptakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasi.

b. Program pembangunan.

1) Program peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan investasi daerah

Program peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan investasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan perijinan investasi daerah.

2) Program penyediaan fasilitas umum

Program penyediaan fasilitas umum ditujukan untuk menyediakan fasilitas umum yang representatif dan menurunkan kesenjangan ketersediaan fasilitas umum antar wilayah.

3) Program peningkatan sarana dan prasarana informasi dan akselerasi informasi

Program peningkatan sarana dan prasarana informasi dan akselerasi informasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi pemerintahan, serta meningkatkan akses masyarakat kepada informasi daerah.

4) Program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi ditujukan untuk menurunkan jumlah jalan dan jembatan rusak, meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan jalan, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan ketertiban angkutan umum.

5) Program peningkatan sarana kepariwisataan

Program peningkatan sarana kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan jangkauan layanan kepariwisataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan obyek-obyek wisata.

6) Program peningkatan sarana prasarana lingkungan

Program peningkatan sarana prasarana lingkungan ditujukan untuk pemeratakan ketersediaan dan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana lingkungan.

7) Program penataan ruang

Program penataan ruang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan penataan ruang dan meningkatkan kualitas penataan ruang.

C. Agenda Perwujudan Pemerintahan Demokratis.

1. Strategi dan program pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakkan hukum

a. Strategi pembangunan

Secara umum tingkat penerapan penegakkan hukum di Kabupaten Banyumas pada saat ini cukup baik. Hal tersebut terdorong dari makin meningkatnya penyuluhan hukum baik secara intensitas maupun kelompok sasaran penyuluhan dan makin tingginya penyelesaian kasus hukum yang ada. Pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan untuk mengupayakan penanganan kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah sebesar 100% (seratus persen) dari kasus-kasus yang dilaporkan.

Pembaharuan Perda baik dalam rangka perbaikan Perda-perda yang tidak sesuai maupun Perda-perda baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, pada tahun 2008 diharapkan dapat meningkat menjadi ± 12 Perda selama satu tahun anggaran. Peraturan Bupati ditargetkan terbit sebanyak ± 200 dan Keputusan Bupati sebanyak ± 2.050 .

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan target tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, kebenaran serta penghargaan atas hak asasi manusia
Perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat akan produk-produk hukum terkadang mengakibatkan berkurangnya kepastian hukum, rasa keadilan, kebenaran dan penghargaan atas hak asasi manusia dalam upaya penegakkan hukum. Oleh karena itu untuk mendukung penyelenggaraan penegakkan hukum secara konsisten dan menjamin adanya kepastian hukum diperlukan peningkatan kapasitas daerah dalam penerapan dan penegakkan hukum serta penyelenggaraan bantuan hukum.
- 2) Peninjauan dan pengaturan kembali produk hukum dalam rangka demokratisasi, transparansi dan persamaan hak
Beberapa produk hukum daerah memerlukan deregulasi terhadap produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya peninjauan dan pengaturan kembali produk hukum dalam rangka demokratisasi, transparansi dan persamaan hak.

b. Program pembangunan

- 1) Program pembinaan hukum
Program pembinaan hukum ditujukan untuk meningkatkan peranserta masyarakat terhadap pembentukan produk-produk hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi produk-produk hukum kepada masyarakat.
- 2) Program penerapan dan penegakan hukum
Program penerapan dan penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penerapan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum.
- 3) Program legislasi daerah.
Program legislasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk-produk hukum daerah

2. Strategi dan program pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

a. Strategi pembangunan

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas pada saat ini sudah berlangsung sesuai dengan kewenangan dan kelembagaan yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah provinsi. Pada tahun 2007-2008, Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan *One Stop Service* (OSS) yang ditargetkan akan terlaksana pada tahun 2007 dimana :

- (1). Penurunan jumlah hari kerja pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari alokasi yang diatur, ditargetkan dapat ditingkatkan dari 2 bulan menjadi 14 hari kerja;
- (2). Penurunan jumlah hari kerja pelayanan persetujuan prinsip izin usaha rekreasi dan hiburan (izin tetap), ditargetkan dapat ditingkatkan dari 40 hari kerja menjadi 6 hari kerja;
- (3). Penurunan jumlah hari kerja pelayanan persetujuan prinsip izin usaha rekreasi dan hiburan (izin insidental) ditargetkan dapat ditingkatkan dari 40 hari kerja menjadi 3 hari kerja;
- (4). Penurunan jumlah hari kerja pelayanan izin usaha rumah makan ditargetkan dapat ditingkatkan dari 30 hari menjadi 6 hari kerja;

Penyelenggaraan pemerintahan belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dan sarana prasarana penunjang. Untuk itu diperlukan peningkatan integritas moral dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana penunjang.

b. Program pembangunan

1) Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2) Program penataan dan pengembangan pegawai.

Program pengembangan pegawai ditujukan untuk meningkatkan sistem pembinaan karier pegawai.

3) Program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah

Program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai.

4) Program peningkatan kinerja penyelenggaraan kehumasan dan sistem informasi pemerintahan

Program peningkatan kinerja penyelenggaraan kehumasan dan sistem informasi pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi dalam administrasi pemerintahan dan meningkatkan akses masyarakat kepada informasi penyelenggaraan pemerintahan.

5) Program penyelenggaraan pemerintahan umum

Program penyelenggaraan pemerintahan umum ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengendalian pembangunan daerah dan meningkatkan pemahaman politik dan demokrasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Langsung disamping itu program ini adalah dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pilkadaes yang akan dilaksanakan pada tahun 2007.

6) Program pengembangan administrasi pemerintahan

Program pengembangan administrasi pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan meningkatkan akses aparat pemerintah kepada ketersediaan arsip-arsip pemerintahan.

7) Program penelitian, pengembangan dan penerapan iptek daerah

Program penelitian dan pengembangan dan penerapan iptek daerah ditujukan untuk menyediakan dukungan informasi potensi daerah dalam analisis kebijakan pembangunan dan mengembangkan sistem jaringan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

8) Program peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah

Program peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan akses masyarakat dalam partisipasi perencanaan pembangunan.

9) Program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah

Program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran keuangan daerah dan meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah.

10) Program penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan

Program penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan ditujukan untuk mencukupi ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

BAB V

RINGKASAN PENDANAAN

A. Proyeksi Pendapatan.

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas selama 5 tahun anggaran dari tahun 2001 sampai dengan 2006 terus mengalami peningkatan. Komponen pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Bagian Laba Usaha Daerah
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
 - a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - d. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Propinsi
3. Lain-lain Pendapatan yang sah

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005.

Realisasi Anggaran	PAD (Rp)		Dana perimbangan (Rp)		Lain-lain pendapatan yang sah (Rp)		Jumlah pendapatan (Rp)	
		%		%		%		%
2001	30,447,270,273		316,801,067,500		-		347,248,337,773	
2002	37,710,738,575	23.66	259,067,343,557	(18.21)	103,337,754		596,661,419,933	14.29
2003	45,045,836,800	19.45	423,102,317,490	65.23	4,601,507,663	1,565.86	477,670,051,953	20.44
2004	43,279,254,000	(3.62)	422,214,362,000	(1.38)	31,322,457,105	540.83	496,815,803,215	3.94
2005	47,801,064,400	6.34	453,664,362,000	6.45	21,320,000,000	342.10	524,515,990,400	9.82
2006*	66,835,633,400	59.05	699,002,722,890	63.19	1,181,685,000	(96.23)	759,020,071,390	52.76

* APBD Perubahan Kabupaten Banyumas tahun 2006

Sumber : BPKD Kabupaten Banyumas 2005

Tabel 5.1. Indikasi Pagu Anggaran Program Pembangunan SKPD Tahun 2007.

NO	SKPD	PAGU INDIKATIF RKPD 2007	Prosen tase
1	Bagian Daibang Setda Kabupaten Banyumas	4,479,000,000	1.40
2	Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	625,000,000	0.20
3	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas	363,000,000	0.11
4	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	688,000,000	0.22
5	Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyumas	31,313,320,000	9.82
6	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	5,860,000,000	1.84
7	Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	90,000,000	0.03
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	3,738,230,000	1.17
9	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	3,788,150,000	1.19
10	Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas	2,720,981,859	0.85
11	Balitbangtelarda Kabupaten Banyumas	1,044,550,000	0.33
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas	3,050,000,000	0.96
13	Badan Pegawasan Daerah Kabupaten Banyumas	965,306,275	0.30
14	BKCKB Kabupaten Banyumas	2,279,990,000	0.71
15	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas	2,788,641,910	0.87
16	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	31,712,654,225	9.94
17	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	47,663,390,000	14.91
18	Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	3,272,000,000	1.03
19	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas	1,178,000,000	0.37
20	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	2,113,000,000	0.66
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas	2,503,500,000	0.78
22	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas	3,757,000,000	1.18
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas	2,981,000,000	0.93
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	2,244,000,000	0.70
25	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas	4,798,000,000	1.50
26	Dinas Sumber Daya Air Tamben Kabupaten Banyumas	8,781,500,000	2.75
27	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	23,550,000,000	7.41
28	DKSPM Kabupaten Banyumas	10,133,000,000	3.18
29	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	4,591,000,000	1.44
30	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	70,756,005,000	22.18
31	Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas	1,813,000,000	0.57
32	Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas	703,000,000	0.22
33	Rumah Sakit Umum Banyumas	25,725,000,000	8.06
34	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	924,000,000	0.29
35	Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	3,262,218,000	1.02
36	SKB Ajibarang	606,418,000	0.19
37	SKB Kalibagor	1,319,689,200	0.41
38	SKB Purwokerto	803,481,350	0.25
JUMLAH		318,985,005,819	100

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan Tahun 2007 yang tertuang dalam RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008, kebijakan pembangunan tahun 2007 diarahkan pada pembangunan *kemandirian daerah dengan menjadikan investasi daerah sebagai pilar utama yang didukung oleh pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.*

Agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2007 yang hendak dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif, maka perlu dikembangkan suatu rencana menyeluruh, terjadwal dan transparan. Peran masyarakat sebagai kontrol yang positif untuk menilai kinerja pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hak asasi manusia, mewujudkan penegakkan dan pembaharuan hukum secara demokratis, transparan serta dapat dipertanggung jawabkan dan didukung pula oleh partisipasi para stakeholder daerah yang memiliki sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan itu, seluruh penyelenggaraan pembangunan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara sungguh-sungguh dilaksanakan oleh para penyelenggara dan pelaku pembangunan dengan berpedoman pada Program-program Pembangunan sebagaimana yang tertuang pada RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2007 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Banyumas.

